

MITOS KESEMPATAN SETARA DAN REPRODUKSI KETIMPANGAN SOSIAL (Potret Konkret Ketidakadilan Sosial dalam Pendidikan bagi Anak-anak Petani Tambak di Wilayah Pinggiran Indramayu)

Sahrudin

Institut Agama Islam Pangeran dharma Kusuma Indramayu

Sahrudinmaslim8@gmail.com

DOI : 10.55656/wjp.v1i1.299

ABSTRACT

The Universal Declaration of Human Rights in 1948 states that every individual has the right to education. Therefore, education must be accessible to everyone regardless of differences in ethnicity, social status, geographic location, religion, political views, or physical and mental conditions. This highlights that every child should have equal opportunities to receive education. The success of education in Indonesia is generally measured by two aspects: the teaching and learning process, and the outcomes, which are evaluated based on competencies. To achieve this success, educational tools are required, including both human resources (teachers) and non-human resources. However, there is a significant gap between education in urban and rural areas, including in the outskirts. One example is the education of children of fish farmers in the outskirts of Indramayu city. Is it true that schools provide equal opportunities for all children, or is this merely a myth? In reality, social inequality is reproduced through the education system. Does the school system benefit students from higher social classes more? What is the condition of education for the children of fish farmers in the outskirts of Indramayu? Their education in Cantigi Village, Indramayu, falls far below acceptable standards. Even the learning facilities are not comfortable enough for students to gain knowledge. This situation is worsened by the lack of educational facilities to support successful learning, in stark contrast to schools in urban areas. At the primary level, this is the critical time for children to develop their cognitive, affective, and psychomotor skills. This reality aligns with Pierre Bourdieu's critique that schools function as institutions that reproduce social inequality. According to Bourdieu, social inequality in education is particularly evident when comparing the chances of entering higher education: students from upper social classes have an 80% chance, while those from farmer and laborer backgrounds have only a 40% chance.

Keywords: reproduction, social inequality, fish farmers

ABSTRAK

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus diakses oleh semua orang tanpa memandang perbedaan suku, status sosial, lokasi geografis, agama, pandangan politik, maupun kondisi fisik dan mental. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Keberhasilan pendidikan di Indonesia umumnya diukur melalui dua aspek: proses belajar mengajar serta hasil yang dievaluasi berdasarkan kompetensi. Untuk mencapai keberhasilan ini, diperlukan dukungan alat-alat pendidikan, baik berupa tenaga pengajar maupun sarana

non-manusia. Namun, kenyataannya terdapat kesenjangan yang mencolok antara pendidikan di kota dan di desa, termasuk di daerah pinggiran. Salah satu contohnya adalah pendidikan anak-anak petani tambak di wilayah pinggiran kota Indramayu. Apakah benar bahwa sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, ataukah ini hanya mitos? Di lapangan, justru tampak adanya reproduksi ketidakadilan sosial melalui sistem pendidikan. Apakah sistem sekolah lebih menguntungkan siswa dari kalangan sosial atas? Bagaimana kondisi pendidikan bagi anak-anak petani tambak di pinggiran Indramayu? Pendidikan mereka di Desa Cantigi, Indramayu, jauh dari standar kelayakan. Bahkan, fasilitas tempat belajar mereka tidak memberikan kenyamanan yang memadai untuk proses belajar. Keadaan ini diperburuk oleh minimnya fasilitas pendidikan yang mendukung keberhasilan pembelajaran, sangat berbeda dengan kondisi sekolah-sekolah di perkotaan. Padahal, pada tingkat pendidikan dasar inilah anak-anak seharusnya mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Kenyataan ini sejalan dengan kritik Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa sekolah hanya berfungsi sebagai institusi yang mereproduksi kesenjangan sosial. Menurut Bourdieu, ketimpangan dalam pendidikan sangat terlihat, terutama dalam hal kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, di mana siswa dari kelas sosial atas memiliki peluang 80%, sedangkan mereka yang berasal dari latar belakang petani dan buruh hanya 40%.

Kata Kunci: reproduksi, ketidakadilan sosial, petani tambak

Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, status sosial, lokasi geografis (keterpencilan), agama, pandangan politik, serta perbedaan kondisi fisik dan mental. Ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hak yang sama untuk mengakses pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas."

Pentingnya hak yang sama dalam pendidikan ini sangat mendesak dalam penerapan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas, serta relevansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan guna menghadapi perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Mubarok, 2022, hlm. 65).

Pendidikan berperan dalam membentuk perkembangan dan perubahan perilaku peserta didik. Selain itu, pendidikan juga berkaitan dengan transfer pengetahuan, sikap, keyakinan, keterampilan, dan aspek-aspek lain dari perilaku. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses belajar mengajar yang bertujuan membentuk perilaku manusia sesuai dengan harapan masyarakat (S. Nasution, 1995:10). Perkembangan masyarakat modern mengharuskan sebagian besar tugas pendidikan dijalankan oleh lembaga yang disebut sekolah, meskipun hal ini tidak berarti menghapus tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Dengan demikian untuk menciptakan pendidikan yang ideal diperlukan kerjasama antara pengelola sekolah, guru dan orang tua siswa secara berkesinambungan

guna menciptakan suasana belajar yang baik bagi siswa baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah (Mubarak dkk., 2024, hlm. 19).

Sekolah dianggap sebagai jalur efektif untuk meningkatkan status sosial. Melalui pendidikan di sekolah, orang berharap dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun posisi sosial (Tufiqurrahman, 2010). Tujuan dari pendidikan sekolah adalah mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, sekolah memiliki mitos bahwa setiap individu dari berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan (J.I.G.M. Drost, SJ, 1998: 68).

Secara umum, keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kekuatan sosial dari mereka yang terlibat, yaitu murid, orang tua murid, dan pengajar. Sekolah sangat terkait dengan budaya lingkungan sosial di mana mereka beroperasi. Namun, pada kenyataannya, sekolah kini tidak hanya dilihat sebagai sarana pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, seperti yang sering diyakini. Saat ini, sekolah telah mengembangkan budaya baru yang menciptakan kesenjangan sosial. Sejak di sekolah dasar, siswa sudah didorong untuk berprestasi dan mencapai peringkat tinggi di kelas, sehingga sejak dini mereka bersaing untuk memperoleh posisi yang menjanjikan status sosial di masa depan. Kondisi ini muncul dan berkembang karena adanya ketidaksetaraan di lembaga pendidikan. Selain itu, nama sekolah dan lembaga pendidikan sering kali diperdagangkan, yang menciptakan ketidakadilan. Anak-anak dari keluarga menengah ke bawah seringkali tidak dapat bersaing karena keterbatasan ekonomi, meskipun mereka mungkin memiliki potensi yang lebih besar.

Contoh nyata dari ketimpangan sosial dalam pendidikan terlihat di SDN 1 Cantigi kulon, Desa Cantigi Kulon Indramayu. Sekolah dasar ini adalah satu-satunya sekolah di daerah tambak di pinggiran Indramayu, berbatasan dengan laut Jawa. Kondisi sekolah yang jauh dari layak mencerminkan adanya reproduksi kesenjangan sosial melalui pendidikan. SD di Desa Cantigi Kulon masih berbahan dasar kayu dengan fasilitas yang sangat minim untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Sementara anak-anak di kota bersekolah di sekolah-sekolah elite dengan fasilitas lengkap, dan bahkan sekolah negeri di kota memenuhi standar nasional dalam hal sarana, kondisi sebaliknya terjadi di SDN pinggiran Indramayu. Sekolah dasar satu-satunya yang terdekat bagi anak-anak petani tambak ini tidak memiliki fasilitas yang memadai, bahkan tidak ada perpustakaan atau buku sebagai sarana untuk menambah pengetahuan. Hal ini justru memperkuat gagasan bahwa "kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan" hanyalah mitos, karena kenyataannya sekolah malah mereproduksi ketidaksetaraan sosial.

Perumusan Masalah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas." Pernyataan ini seharusnya memberi harapan bagi semua warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Namun, kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kondisi yang mencolok justru terlihat di SDN Desa Cantigi Kulon Indramayu, sebuah desa di pinggiran kota yang berdekatan dengan laut Jawa, di mana mayoritas penduduknya adalah petani tambak.

Berdasarkan perumusan masalah, terdapat tiga pertanyaan utama yang perlu dijawab:

1. Bagaimana teori Pierre Bourdieu menjelaskan reproduksi kesenjangan sosial?
2. Bagaimana proses reproduksi kesenjangan sosial di sekolah dasar, khususnya di SDN 1 Cantigi Kulon Desa Cantigi Kulon Indramayu?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari orang-orang yang diamati.

Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, salah satunya adalah **wawancara**. Menurut Saebani dan Afifudin (2009:131), wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan peneliti bertindak sebagai instrumen utama, wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam dari para guru, siswa, dan orang tua siswa yang menjadi informan.

Observasi. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati aktivitas subjek penelitian secara langsung. Teknik ini berperan sebagai salah satu metode *triangulasi* data untuk memastikan keakuratan hasil penelitian. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran di SDN 1 Cantigi Kulon.

Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (2009:16), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dikenal sebagai model analisis data interaktif.

Pembahasan

Reproduksi Kesenjangan Sosial dalam Konsep Teori Pierre Bourdieu

Buku *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi* karya Haryatmoko, yang didasarkan pada pemikiran Pierre Bourdieu, menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis bagaimana kesenjangan sosial terjadi di sekolah dan masyarakat. Buku ini membahas reproduksi kesenjangan melalui sistem pendidikan, terutama di sekolah, dan mengkritisi bagaimana sekolah sering kali menjadi sarana reproduksi kesenjangan sosial. Bourdieu mempertanyakan apakah sistem pendidikan benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, atau justru lebih menguntungkan siswa dari kelas sosial yang lebih tinggi.

Sekolah elit sering dianggap sebagai institusi yang unggul karena fasilitas modern yang ditawarkannya, meskipun biaya pendidikan di sana tinggi. Sekolah-sekolah ini secara berkelanjutan memperbarui fasilitasnya dan, dengan demikian, menjadi alat reproduksi kesenjangan sosial. Kesenjangan ini muncul dari ketidakseimbangan dalam sistem dan struktur sekolah-sekolah elit tersebut. Dalam analisis ini, digunakan dua konsep utama dari teori Bourdieu, yaitu *habitus* dan kesenjangan sosial. Bourdieu berusaha membangun teori hubungan sosial yang berbasis pada kekayaan budaya, pewarisan budaya, serta bagaimana budaya tersebut dikonstruksi dan diadopsi oleh individu dalam masyarakat.

Dalam konsep *habitus*, dijelaskan bahwa hubungan antar kelas sosial melibatkan dimensi budaya, simbolik, moral, psikologis, dan fisik. *Habitus* adalah hasil dari keterampilan yang menjadi tindakan praktis (meskipun tidak selalu disadari) dan tampak sebagai kemampuan alami yang berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Dalam proses perolehan keterampilan tersebut, struktur yang awalnya dibentuk oleh individu berubah menjadi struktur yang membentuk individu. *Habitus* dapat diartikan sebagai kebiasaan atau sifat yang melekat pada seseorang. Setiap individu memiliki *habitus* yang berbeda-beda, dan *habitus* ini bisa mencerminkan kelas sosial, era, atau pembatas sosial lainnya. *Habitus* tidak bersifat permanen, tetapi selalu berubah dan berinteraksi dengan struktur sosial, menginternalisasi pengaruh eksternal dan mengeksternalisasi pengaruh internal. *Habitus* berfungsi sebagai basis generatif yang terstruktur dan terpadu dalam dunia objektif, yang menjadi dasar bagi improvisasi individu.

Namun, konsep habitus ini tidak mendukung determinisme yang membatasi tindakan individu dalam kerangka struktur sosial yang memaksa. Meskipun individu bersifat mandiri dan rasional, pemikiran mereka tetap dipengaruhi oleh pandangan dunia yang terkait dengan posisi sosial tertentu. Keterampilan individu dalam merespons tantangan dipengaruhi oleh lingkungan dan rutinitasnya, namun tetap ada kemampuan kreatif dan strategis yang berkembang. Oleh karena itu, meskipun ada faktor deterministik dalam kehidupan peserta didik, konsep habitus tetap memperhitungkan kreativitas dan strategi individu. Bahkan peserta didik dari lingkungan miskin masih memiliki kemungkinan untuk sukses dalam pendidikan. Mereka mampu melampaui keterbatasan sosial mereka. Tingkat keberhasilan yang rendah sering kali digunakan untuk menutupi mekanisme seleksi sosial di sekolah, seolah-olah semua siswa memiliki kesempatan yang sama. Mekanisme seleksi sosial ini jarang dipertanyakan.

Dengan pendekatan ini, Bourdieu membedakan diri dari pendekatan kelas ala Marxis yang lebih menekankan aspek individu dan keseharian dalam analisis sosial. Secara teknis, Bourdieu mengkaji dampak kesenjangan budaya terhadap komunikasi pendidikan, dengan menekankan bahwa sistem pendidikan adalah sumber utama kesenjangan sosial. Kesenjangan ini bukan hanya tentang perbedaan pendapatan, tetapi lebih terkait dengan perbedaan modal budaya. Ada hubungan antara keberhasilan di sekolah dengan tingkat pendampingan keluarga, pendidikan orang tua, dan kemudian modal ekonomi. Dua karya Bourdieu yang telah menjadi klasik masih relevan untuk mengamati sistem pendidikan di Indonesia. Melalui pendekatannya, Bourdieu mendekonstruksi peran sekolah dan mengungkap hubungan dominasi yang tidak adil dalam sistem pendidikan, serta menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Bourdieu, agen-agen dalam interaksi sosial adalah pelaku strategi, dengan ruang dan waktu menjadi bagian integral dari strategi mereka. Strategi ini dibentuk oleh kondisi sosio-kultural, yang disebut Bourdieu sebagai *habitus*, yaitu seperangkat disposisi yang terstruktur dan secara berkelanjutan membentuk tindakan individu. Agen-agen ini diposisikan oleh habitus mereka dalam persaingan untuk mendapatkan kehormatan dan modal simbolik dalam berbagai bidang pemikiran dan tindakan yang saling terkait. Melalui studinya tentang pendidikan, seni, dan negara, Bourdieu menunjukkan bagaimana kelas menengah secara tidak sadar terlibat dalam mereproduksi ketimpangan terstruktur, yang menjadi dasar dalam relasi produksi kapitalis. Ketimpangan ini tercermin dalam akses yang tidak setara terhadap modal simbolik, serta penetapan kompetensi budaya yang tidak adil, yang kemudian mengendalikan kekuasaan ekonomi, politik, dan budaya. Kelas dominan tidak hanya menguasai ekonomi dan politik, tetapi juga melanggengkan kekuasaan mereka melalui kekerasan simbolik, penetapan selera, dan kekerasan bisu, sehingga mereka yang tidak memiliki akses terhadap sarana produksi atau modal budaya terus-menerus mengalami kegagalan.

Reproduksi Kesenjangan Sosial melalui Sekolah di SDN 1 Cantigi Kulon, Desa Cantigi Kulon Indramayu

Kesenjangan sosial dalam pendidikan sangat terlihat, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah. Salah satu contohnya adalah SDN 1 Cantigi Kulon di Desa Cantigi Kulon Indramayu. Sekolah ini sebagian besar diisi oleh anak-anak petani tambak, dan seluruh siswanya adalah penduduk setempat. Lokasi dusun ini terpencil, terletak di tepi laut Jawa dan berjarak sekitar 30 km dari kota. SDN 1 Cantigi Kulon adalah satu-satunya sekolah dasar di wilayah tersebut, dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,

diperlukan perjalanan sejauh 25 km. Kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang mendukung, seperti, membuat akses terhadap informasi dan pendidikan semakin sulit.

Sekolah ini mencerminkan kesenjangan sosial yang nyata dalam pendidikan. Bangunan sekolah yang terbuat dari kayu berada dalam kondisi yang jauh dari layak, dengan fasilitas yang sangat minim untuk mendukung proses pembelajaran. Tidak ada perpustakaan atau fasilitas lain yang memadai, membuat peserta didik sulit mengakses dunia luar. Kondisi ini menguatkan teori Bourdieu tentang mitos kesempatan yang sama di sekolah, yang pada kenyataannya justru mereproduksi kesenjangan sosial. Ada perbedaan yang signifikan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil, yang berlawanan dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Latar belakang keluarga juga mempengaruhi budaya belajar anak di sekolah. Orang tua di Desa Cantigi Kulon, yang sebagian besar adalah petani tambak dengan pendidikan rendah, memiliki sedikit waktu dan kemampuan untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Bourdieu menjelaskan bahwa kesenjangan sosial dalam pendidikan bukan hanya tentang perbedaan pendapatan, tetapi lebih pada perbedaan modal budaya. Hubungan antara keberhasilan di sekolah dengan pendampingan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan modal budaya lebih kuat daripada pengaruh modal ekonomi. Anak-anak dari keluarga kelas atas lebih siap bersaing karena habitus mereka. Sistem seleksi pendidikan yang dimulai sejak dini inilah yang mendukung reproduksi kesenjangan sosial. Penguasaan bahasa, yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan di sekolah, menjelaskan bagaimana habitus keluarga memengaruhi produktivitas pendidikan.

Sekolah sering dianggap sebagai sarana efektif untuk meraih mobilitas sosial. Melalui pendidikan, masyarakat berharap dapat meningkatkan taraf hidup, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun status sosial. Di dalam imajinasi sosial, sering digambarkan bahwa mobilitas sosial bisa terjadi dalam tiga generasi, misalnya dari kakek yang bekerja sebagai petani, orang tua yang menjadi guru, hingga anak yang menjadi intelektual, pemimpin perusahaan, atau pejabat (Haryatmoko, 2006:165). Namun, di balik keyakinan bahwa sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi semua, kenyataannya budaya sekolah sering kali mensyaratkan kondisi tertentu bagi mereka yang ingin mencapai posisi terhormat di universitas unggulan. Praktik pengajaran sehari-hari di berbagai jenjang pendidikan sering kali tidak memperhitungkan latar belakang sosial siswa. Pada kelas bawah, sering kali ada kebiasaan keluarga yang tidak mendukung kesiapan anak untuk menyesuaikan diri dengan budaya sekolah, terutama dalam keterampilan bahasa (Haryatmoko, 2010:176).

Kesenjangan dalam sekolah mencerminkan adanya kesenjangan budaya. Bourdieu, melalui konsep *habitus*, memperkaya analisis hubungan antar kelas sosial dengan memasukkan dimensi budaya, simbolik, moral, psikologis, dan fisik. *Habitus* terbentuk dari keterampilan yang menjadi tindakan praktis (sering kali tidak disadari), yang berkembang dalam lingkungan sosial tertentu dan tampak seperti kemampuan yang alami (Bourdieu dalam Haryatmoko, 2010:175). Konsep ini menunjukkan bahwa keterampilan seseorang dalam menghadapi tantangan dipengaruhi oleh lingkungannya dan rutinitas tindakan. Meski ada faktor-faktor yang membebani siswa dari kelas bawah, *habitus* tetap memberikan ruang bagi kemampuan kreatif dan strategis. Oleh karena itu, ada kemungkinan bagi siswa dari lingkungan yang kurang beruntung untuk berhasil dalam pendidikan.

Namun, budaya kelas atas lebih siap untuk menghadapi persaingan di sekolah. Keluarga-keluarga kelas atas sudah terbiasa dengan budaya membaca, memiliki akses ke buku-buku, komputer, dan ruang belajar yang memadai, serta memiliki kebiasaan berdiskusi

yang meningkatkan keterampilan bahasa mereka. Kesiapan ini membuat mereka lebih mudah meraih posisi terbaik di pendidikan tinggi. Perspektif budaya ini menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, tetapi juga memiliki orientasi humanistik, mengatasi masalah keadilan, dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, anggapan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama adalah asumsi yang salah. Bourdieu menunjukkan bahwa kelas elite sudah memiliki modal budaya yang lebih kuat, sehingga mereka lebih siap bersaing untuk mendapatkan tempat di universitas unggulan.

Siswa dari keluarga miskin harus berjuang lebih keras karena mereka jauh dari akses terhadap fasilitas pendidikan dan budaya. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga kelas atas yang sejak kecil sudah terbiasa dengan buku, komputer, perpustakaan, dan diskusi, yang semuanya membentuk kemampuan berpikir kritis. Mereka juga sudah terbiasa menggunakan bahasa yang tajam dan cerdas, yang secara tidak langsung mengasah kemampuan mereka untuk berpikir. Dari sinilah muncul ide bahwa bakat adalah faktor bawaan, padahal kenyataannya keberhasilan tersebut merupakan hasil dari keterampilan dan kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungan sosial mereka. *Habitus* ini berkembang melalui pembiasaan yang kemudian terlihat seperti kemampuan alami{P. Bourdieu, *Le sens pratique*}.

Simpulan

Kesenjangan sosial melalui pendidikan merupakan cerminan jelas dari kondisi masyarakat di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Hal ini umumnya dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, seperti petani dan buruh. Sementara itu, kalangan atas terbentuk oleh *habitus* budaya keluarga yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk siap bersaing di dunia kerja. Mereka memberikan dukungan sejak dini, baik dalam bentuk fasilitas belajar, ruang belajar yang memadai, maupun akses ke sekolah-sekolah elit. Sebaliknya, anak-anak dari kalangan bawah cenderung kurang mendapat perhatian dalam hal perkembangan mereka, sehingga mereka kurang siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Perbedaan ini dapat diatasi jika setiap anak diberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan yang bermutu melalui sekolah.

Wacana mengenai "kesempatan yang sama" menjadi harapan bagi kalangan bawah yang ingin mengubah nasib keturunannya melalui pendidikan. Namun, harapan ini sering kali terhalang oleh reproduksi kesenjangan sosial yang terjadi di sekolah. Perbedaan yang nyata terlihat antara sekolah-sekolah elit di perkotaan dan sekolah-sekolah di daerah terpencil, seperti Sekolah Dasar Negeri 1 Cantigi Kulon Indramayu, di mana kondisi bangunan dan minimnya fasilitas sangat tidak memadai untuk proses pembelajaran. Hal ini menggambarkan adanya reproduksi kesenjangan sosial melalui sekolah, yang pada akhirnya membenarkan mitos tentang "kesempatan yang sama". Kritik Pierre Bourdieu menyatakan bahwa sekolah sering kali berfungsi sebagai lembaga yang mereproduksi kesenjangan sosial (Bourdieu dalam Haryatmoko, 2010). Bourdieu juga mencatat bahwa kesenjangan sosial dalam pendidikan menjadi sangat jelas, terutama dalam hal akses ke perguruan tinggi, di mana siswa dari kelas atas memiliki kemungkinan 80% untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak-anak dari keluarga petani dan buruh hanya memiliki peluang sebesar 40%{Bourdieu dan Passeron dalam Haryatmoko, 2010:175}.

Daftar Pustaka

Haryatmoko. (2010). *Dominasi penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: PT. Gramedia, Jakarta.

- J.I.G.M. Drost, SJ. (1998). *Sekolah Mengajar atau Mendidik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mubarok, Frenky. (2022). *Mashadir Tarbawiyah: Pesan-pesan Pendidikan dalam al-Qur'an dan al-Hadits*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Mubarok, Frenky , Azizah, M., Zahra, F., & Muzfirah, S. (2024). *Etika Profesi Keguruan dalam Tinjauan Islam*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- S. Nasution. (1995). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufiqurrahman. (2010). *Sekolah Elit Sebagai Alat Reproduksi Kesenjangan Sosial*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Progam Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kali Jaga.